Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintah

Rafida Bangki¹, Andi Fatimah Sahra².

^{1, 2} Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, e-cmail: ¹ januarifida@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords:	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
Fraud, Keseuaian Kompe	nsasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Penegakan Hukum	terjadinya fraud di sektor pemerintahan khususnya
JEL classification:	pada Desa Lawekara. Responden dalam penelitian
	ini adalah pegawai yang bekerja di Desa Lawekara
	Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan metode
DOI:	purposive sampling total sampel dalam penelitian
	ini yaitu 31 studi pada Desa Lawekara. Hipotesis
	dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
	linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
	bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh
	signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.
	Sedangkan penegakan hukum berpengaruh secara
	signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.

1. Introduction

Salah satu penyebab kecurangan adalah kompensasi yang buruk. Ketidakpuasan yang disebabkan olah gaji yang tidak mencukupi atau pekerjaan yang tidak praktis juga dapat mendukung terjadinya fraud di instansi pemerintahan khususnya desa. Kecurangan bisa dalam bentuk pekerja yang mencuri uang, peralatan dan perbekalan. Seperti yang dikatakan Hehamahua (2010) menjelaskan, gaji pegawai saat ini sangat sedikit dan paling lama hanya bisa bertahan sepuluh hari. Akibatnya, banyak yang mencari penghasilan tambahan melalui korupsi. Membesar – besarkan nilai anggaran dan meningkatkan tunjangan selain kompensasi dasar.

Orang awam sering mengira bahwa penipuan adalah kejahatan atau korupsi dalam arti sempit. Kepatuhan hukum adalah tindakan instan biasa dilakukan oleh badan hukum untuk mematuhi hukum yang ada, yaitu kepatuhan terhadap hukum negara / wilayah. Kebanyakan orang memahami hukum, tetapi tidak mengikuti hukum, sehingga perlu kesadaran publik. Jika penegakan hukum bisa berjalan normal.

Faktor-faktor terjadinya *fraud* atau faktor kecurangan dijelaskan pada *fraud triangle* yang pertama oleh Cressey (1953) mengemukakan bahwa kecurangan disebabkan tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*) adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan (*opportunity*) adalah situasi yang membuka kesempatan untuk dapat melakukan suatu kecurangan, dan pembenaran (*rationalization*) merupakan sikap, karakter, dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya.

Di daerah Kabupaten Kolaka Utara sendiri kasus kecurangan dominan dilakukan oleh Kepala Desa. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah menangani 4 kasus kecurangan yang di dominasi oleh Kepala Desa 3 diantaranya dari Desa, sementara satu kasus lainnya dilakukan OPD.

Objek penelitian di pilih untuk melihat perbandingan kepada penelitian sebelumnya dan untuk mengetahui presepsi para karyawan atau pegawai pada instansi pemerintah khususnya kantor Desa Lawekara yang ada di Kolaka Utara dan mengetahui kecenderungan terjadinya fraud pada sektor pemerintahan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktor–faktor ini terdiri dari kesesuaian kompensasi dan penegakan hukum.

2. Literature Review

Istilah fraud adalah istilah yang telah dimasukkan ke dalam disiplin akuntansi dan menjadi bagian penting dari kosakata akuntansi forensik. Fraud jika diartikan secara harfiah artinya adalah kecurangan (Tuanakotta, 2010). Namun definisi tersebut telah berkembang dan kini memiliki cakupan yang luas. The Black Law Dictionary mendefinisikan penipuan sebagai "segala macam hal yang dapat dipikirkan manusia melalui saran yang salah pada fakta obsesif dan bahwa seseorang atau beberapa orang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, termasuk semua yang tidak dapat diprediksi dan licik, apa pun yang menggunakan metode cara tidak jujur menyebabkan orang lain untuk ditipu, singkatnya dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang yang terkait pada uang atau harta.

Association of certified fraud examiners atau di singkat dengan ACFE (2018) menggunakan istilah "occupational fraud and abuse" dan mendefinisikan menggunakan kedudukan seseorang

untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. *Occupational tree* ini mempunyai tiga cabang, yakni kecurangan pelaporan, penyalahgunaan aset dan korupsi.

Kompensasi yang berarti gaji untuk setiap pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan, suatu hal penting gaji yang diperoleh oleh para pegawai dapat mencukupi kebutuhannya. Memberikan kompensasi berdasarkan kontribusi karyawan kepada organisasi. Salah satu tujuan utama masyarakat bekerja adalah memperoleh gaji atau kompensasi berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penerapan kompensasi merupakan hasil kinerja, atau gaji nominal (uang) yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kompensasi yang mereka terima kepada perusahaan sebagai imbalan kerja. Gaji dapat meningkatkan efisiensi dan motivasi pegawai, karena gaji merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan pegawai, sehingga besarnya gaji dapat mempengaruhi loyalitas dan kinerja pegawai.

Secara garis besar proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan dari berbagai subjek atau dapat diartikan sebagai upaya subjek untuk menegakkan hukum dalam arti terbatas atau sempit. Menurut Asshiddiqie (2008), penegakkan hukum merupakan suatu proses yang berusaha mempertahankan atau melaksanakan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum antara transportasi, kehidupan sosial dan negara. Untuk memastikan penegakan hukum, lembaga penegak hukum diizinkan menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Penegakan didasarkan pada etika, dan nilai-nilai spiritual yang memberikan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya untuk menjaga kebenaran formal, tetapi juga untuk mencari kebenaran materiil yang mendekati kebenaran dasar. Oleh karena itu, tanggung jawab aparat penegak hukum terletak pada moralitas, moralitas dan sikap spiritual.

3. Research Method

1. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah aparat Desa. Lawekara dan pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan menjadi *purposive sampling*. Penentuan tehnik ini merupakan teknik pemilihan sampel yang tidak menggeneralisasi sampel yang diambil.

Metode *purposive sampling* dengan kreteria yaitu pegawai atau aparat Desa. Lawekara Kabupaten Kolaka Utara. Kreteria pemilihan sampel dalam penelitian juga ditetapkan sebagai berikut:

- Pegawai/aparat desa yang bekerja dilingkungan kantor Desa. Lawekara Kabupaten Kolaka Utara.
- 2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada desa tersebut.
- 3. Pegawai/aparat yang bekerja pada bagian atau pelaporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban.

2. Sumber Data

a. Data primer

Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara kuesioner dan wawancara dengan pegawai/aparat desa dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

b. Data sekunder

Data yang dihasilkan atau diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang ada (data tambahan dan penguat data dari sumber data pertama). Data pembantu dapat diperoleh dari berbagai sumber (seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya). Pengumpulan data tambahan lengkap dengan mendapatkan atau menggunakan sebagian atau semua kumpulan data yang direkam atau dilaporkan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan untuk hasil wawancara dan angket, yang disampaikan oleh para responden tehnik pengumpulan data ini dibagi menjadi 2 cara yaitu:

1. Penelitian Pusaka (liberary research)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sementara di teliti menggunakan buku, website resmi, jurnal, dan perangkat lainnya yang berhubungan dengan judul ini.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Data utama pada penelitian ini diperoleh dengan penelitian lapangan, dan penelitian diperoleh langsung oleh pihak pertama (primer). Data mentah merupakan sumber penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (bukan melalui lembaga perantara). Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu mengirimkan langsung kuesioner ke Desa.

Lawekara di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga subjek penelitian (yaitu beberapa pegawai/aparat desa dibagian keuangan) langsung menjadi subjek survei. Data mentah diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi dari pegawai/aparat yang bekerja di kantor Desa. Lawekara sebagai objek penelitian.

4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu penerapan kompensasi dan dampak penegakan hukum terhadap variabel dependen yaitu kecurangan oleh instansi pemerintah khususnya pada desa. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai/aparat desa yang bekerja di kantor Desa. Lawekara Kabupaten Kolaka Utara.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif untuk pengujian kualitas data, diharapkan dapat diperoleh hasil pengukuran jawaban responden yang lebih akurat, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah menggunakan metode statistik.

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan sampel data yang dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dibuat dan dilihat dari nilai ratarata (mean).

2. Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data yang diperoleh oleh kuisioner yang disebarkan, maka diperlukan uji reabilitas dan validitas. Terdapat dua jenis uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya satu kuisioner. Satu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali,2016). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation* yang dapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang di peroleh valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan realiabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya studi pada ketergantungan variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/ bebas). Dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali,2016). Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression). Analisis regresi linear berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel rediktor atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).

5. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran uji hopotesis, digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilakn oleh model regresi berganda, uji statistik ini meliputi:

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependent dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada table *model summary* dan tertulis *Adjusted* R Square.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependent.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a=5%). Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada table *coefficients*.

4. Result

Sampel penelitian berjumlah 39 responden dan pengambilan kuesioner yang disebarkan 39 (100%), kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti 35 (87,7%), dan kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti sebanyak 31 (77%), terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah oleh peneliti karna responden tidak memberikan penilaian terhadap semua pernyataan dalam kuesioner.

4.1. Hasil Uji Analisis Data

4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi kesesuaian kompensasi, dan penegakan hukum fraud di sektor pemerintahan khususnya di Desa Lawekara bahwa pada variabel kesesuaian kompensasi jawaban minimum responden sebesar 12 dan maksimum 21 dengan rata total jawaban 24,55 dan standar deviasi sebesar 3,055. Variabel penegakan hukum jawaban responden sebesar 15 dan maksimum sebesar 19 dengan ratarata total jawaban 25,57. Pada variabel *fraud* di sektor pemerintahan jawaban minimum responden 4 dan jawaban maksimum responden 12 dan rata-rata total jawaban 10,67 dan standard deviasi terbesar 1,953.

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, semakin kecil standard deviasi, maka data tersebut lebih bagus daripada yang memiliki standard devisiasi yang besar.

Apabila standard devisiasi data tersebut kecil maka hal tersebut menunjukkan datadata tersebut berkumpul disekitar rata-rata hitungnya. Jika standard nilai devisiasi jauh lebih besar di banding nilai mean maka, nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan, jika nilai standard devisiasi sangat kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validalitas

Uji validalitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan person cprelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikasinya dibatas 0,05. Hasil uji validalitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kesesuaian kompensasi (KK), penegakan hukum (PH), dan *fraud* disektor pemerintah (FSP) dengan 31 sampel responden.

Variabel kesesuaian kompensasi mempunyai kreteria valid untuk semua nilai item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Variabel penegakan hukum mempunyai kreteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

4.2.2 Hasil Uji Realibilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dan instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliable jika nilai cronbach alpa berada diatas 0,070. Hasil uji reabilitas untuk tiga variabel peneltian yang digunakan dalam penelitian ini. Menunjukkan nilai *cronbahc's alpa* atas variabel kesesuaian kompensasi sebesar 0,711, penegakan hukum sebesar 0,717 dan *fraud* di sektor pemerintah sebesar 0,901. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai *cronbach's alpa* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsistem yang berarti bila pertanyaan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Fcator* (VIF) dan *tolerance* serta besaran korelasi antar variabel independen.

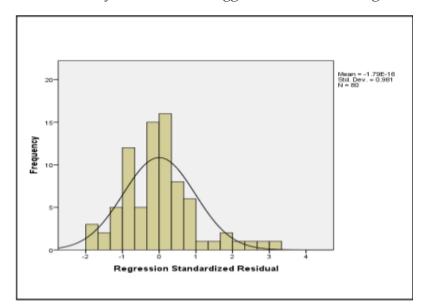
Nilai tolerance masing-masing variabel bebas yang lebih besar dari 0,1 dan hasil penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk kesesuaian kompensasi 0,653, penegakan hukum 0,275, serta VIF 1.232 dan 1.539. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Artinya tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yang di uji dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent dan variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

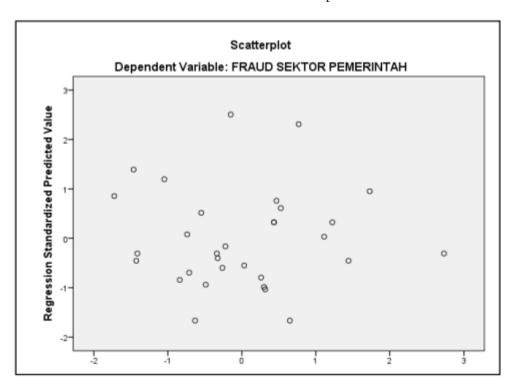
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastis

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi hetoroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi *fraud* disektor pemerintahan berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kesesuaian kompensasi dan penegakan hukum.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R *Square* sebesar 7,1%. Hal ini berarti bahwa sebesar 7,1% variabel dependen atau *Fraud* di sektor pemerintahan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu kesesuaian kompensasi dan penegakan hukum secara bersama terhadap *fraud* di sektor pemerintahan sedangkan sisanya yaitu 92,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar ketiga variabel independent dalam penelitian ini yaitu asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai probalitas lebih kecil dari 0,5 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independent atau dengan kata lain variabel independent secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependent.

Uji signifikansi simultan (statistik F) dapat diketahui didapat nilai F dihitung sebesar 2000, dengan probilitas 0,036 karena probilitas lebih kecil dari 0,05 makan model persamaan regresi ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent yaitu kesesuaian kompensasi dan penegakan hukum berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* di sektor pemerintah.

4.5 Hasil Uji Statistik

Koefisien model regresi memiliki nilai konstanta sebesar 21.19 dengan nilai t (terhitung) positif besar 3,493 dan tingkat signifikasi sebesar 0.01 konstanta sebesar 21.19 menandakan bahwa jika variabel independen konstan maka rata – rata *fraud* di sektor pemerintah sebesar 21.19.

Hasil Uji H_1 : Kesesuaian Kompensasi Tidak Berpengaruh Terhadap Fraud Di Sektor Pemerintahan Khususnya di Desa Lawekara

Variabel KK memiliki t sebesar –0,375 dengan tingkat signifikan 0,709 dan juga dapat dilihat dari *nilai Unstandardized coefficients beta* sebesar 0,99. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikasinya di atas 0,05 dengan demikian hipotesis pertama (H₁) ditolak, artinya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh buruk atau tidak dapat menekan terjadinya *fraud*. Dari hasil analisis data statistik kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, hal ini berarti hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan sebelum penelitian.

Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud di desa Lawekara dikarenakan rata-rata masyarakat desa Lawekara ialah petani begitu pula pada aparat desa yang bekerja didesa Lawekara mereka mempunyai penghasilan tambahan dan masih berpegang pada keyakinan yang mereka anut.

Hasil Uji H₂: Penegakan Hukum Berpengaruh Terhadap Fraud Disektor Pemerintah

Variabel penegakan hukum memiliki nilai t yaitu 1,050 dengan tingkat signifikan sebesar 0,044 dan juga dapat dilihat nilai beta yaitu 0,193. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikasinya lebih rendah dari 0,05 dengan demikian hipotesis kedua (H₂) diterima artinya penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

Penegakan hukum berpengaruh terhadap fraud disektor pemerintahan pada desa. Lawekara karna kesadaran masyarakat desa khususnya aparat yang bekerja pada desa. Lawekara tentang hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran tersebut ketertiban, ketentraman, kedamaian dan keadilan dapat terwujud disuatu desa serta pemerintah setempat memberikan pemahaman kaidah-kaidah hukum yang ditunjukkan dengan memberitahukan isi hukum yang berlaku, salah satunya adalah dengan memahami tujuan hukum yang dimaksud untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

5. Conclusion

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* disektor pemerintahan. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikan sebesar 0,709. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian mustika (2016), faisal (2013) dan walipo (2016) yang menyatakan

- bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi di Desa. Lawekara Kab. Kolaka Utara tidak dapat menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintah
- 2. Penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan oleh besarnya tingkat signifikasi 0,044 dan 0,193 nilai beta. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif penegakan hukum dipemerintahan, maka dapat mengurangi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

References

- Abdullah Hehamhua. (2010). Pengaruh Kompensasi Pada Fraud Dan Ketidak Puasan Pegawai Pada Gaji. https://masnurulhidayat.blogspot.com/2010/12/makalah-solusi-pemecahan-korupsi-html.
- Adinda Y, Ikhsan. (2015). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Accounting Analysis Journal AAJ 4 (3).
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. Accounting Analysis Journal AAJ 2(1).
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustika Putri. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Accounting Analysis Journal AAJ 2(1).
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1).
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta. Salemba Empat.
- The Institute of Internal Auditor, The American Institute of Certified Public Accountangs (AICPA), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018) Managing the Business Risk of Fraud: A Practial Guide..
- Wibisono, Purnomo. (2017). Potensi Resiko Penyalahgunaan Atau (Fraud). https://www.researchgate.net/publication/332967503 Kecenderungan perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.